

# IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Abdul Nasir<sup>1</sup>  
Arwan Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung  
E-mail : [abdul.nasir.amp15@polban.ac.id](mailto:abdul.nasir.amp15@polban.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung  
E-mail : [arwan.gunawan@polban.ac.id](mailto:arwan.gunawan@polban.ac.id)

## ABSTRAK

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2012-2015 mendapatkan nilai “C”, sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan “CC” dan mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bandung Barat. *Good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan agar pemerintah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SPIP adalah tindakan yang terintegrasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. AKIP yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 125 sampel yang tersebar ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta diolah melalui *software SPSS Statistic* versi 23 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *good governance*, SPIP, dan AKIP termasuk dalam kategori sangat baik. Pengaruh implementasi *good governance* dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Peningkatan AKIP dapat didorong dengan adanya kebijakan khusus mengenai *good governance* dan SPIP secara berjenjang dan berkelanjutan.

### Kata Kunci

*Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi telah merubah berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan adanya otonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan berpedoman pada kaidah otonomi daerah yang berlaku [18]. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu tanggap dengan lingkungannya dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara berkualitas dan transparan. Dalam aspek akuntabilitas, program-program pemerintah harus

berorientasi pada hasil, manfaat atau *output* dan *outcome* program-program tersebut. Tidak hanya membelanjakan anggaran lalu dilaporkan dengan baik tetapi dampak positifnya tidak ada.

Dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan lebih berdaya guna. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan suatu

instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dari instansi pemerintah terkait [7].

Dewasa ini, akuntabilitas kinerja pemerintah sering disoroti karena akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terlihat tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Masih banyak ditemukan beberapa Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih belum sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Ketidakesesuaian tersebut salah satunya dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana masih belum baik dan hasil rivi penilaian yang tidak ditindaklanjuti. [8]

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mana laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang baik dan belum memuaskan. Dari tahun 2012 hingga 2016, predikat hasilnya berkisar di nilai "C" dan "CC" [17].

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat predikat "B" dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari KEMENPAN-RB. Ini sebuah prestasi mengingat tahun sebelumnya mendapat "CC", namun dengan nilai "B" tersebut masih kurang dari rata-rata penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik [9].

Kondisi tersebut tidak terlepas dari implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum optimal. Pada operasional penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, para aparatur pemerintah masih belum memaknai secara totalitas visi strategis dari kepala daerah, akuntabilitas kinerja melalui media website E-Porja masih belum optimal, masih terdapat tumpang tindih kebijakan dan ego sektoral, keterbukaan akses informasi mengenai kinerja masih kurang, serta efektivitas dan efisiensi yang belum tercapai. Dengan implementasi *good governance* melalui prinsip supremasi hukum, prinsip transparansi, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip visi strategis diharapkan mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagaimana penelitian Perwirasari (2016)[14]. Selain itu pula, penerapan dari unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih belum maksimal [6].

Masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini yaitu mengenai implemmentasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pemahaman, pengetahuan, dan wawasan secara pribadi bagi peneliti ataupun pembaca serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat, baik secara parsial maupun simultan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:17) mendefinisikan *good governance is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation's affair at all levels* [1]. UNDP lebih menekankan *good governance* pada aspek politik. Adapun prinsip-prinsip dalam *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) yaitu *participation, rule of law, tranparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision* [10].

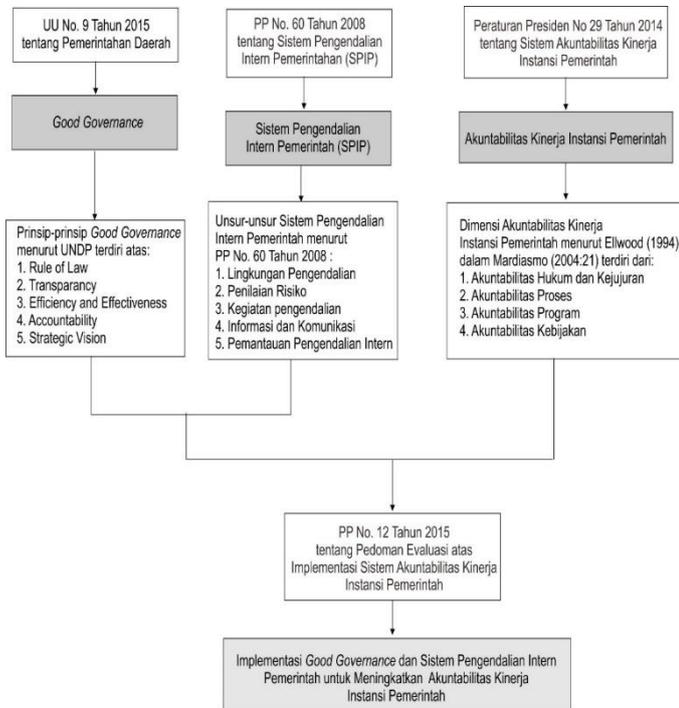
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [13]. Unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern [13].

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik [11]. Bentuk dari pertanggungjawaban ini disusun dan disampaikan dalam laporan yang dinamakan Laporan Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2004:21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan [10].

Adapun bagan kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu :

- 1)  $H_{a1}$  : Implementasi *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat
- 2)  $H_{a2}$  : Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat
- 3)  $H_{a3}$  : Implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat

### 3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun subjek penelitiannya adalah Organisasi Perangkat Daerah. Lingkungan (*setting*) penelitian adalah menggunakan setting alamiah berbentuk studi lapangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan unit analisis pada penelitian ini yaitu

individual. Horizon waktu pada penelitian ini menggunakan *Studi Cross Sectional*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berada pada Eselon IIA, Eselon IIB, Eselon IIIA, Eselon IIIB, dan Eselon IVA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu implementasi *good governance* ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $Y$ ). Penelitian ini menggunakan tipe hubungan antar variabel berbentuk sebab akibat (kausal).

Variabel implementasi *good governance* ( $X_1$ ) diukur berdasarkan lima dimensi yang mana merupakan prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) yang disesuaikan dengan studi kasus dan hasil survey yaitu *rule of law, transparency, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision* [10]. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) diukur berdasarkan lima dimensi yaitu unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern [13]. Sedangkan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $Y$ ) diukur berdasarkan empat indikator yaitu dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Ellwood (1994) yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan [10].

Adapun sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 125 orang yang terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan kriteria Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Kelembagaan, Subbagian Ketatalaksanaan, Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Penyusunan Program, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum. Bagian dan jabatan tersebut dipilih sebagai sampel karena jabatan tersebut memiliki tanggungjawab khusus terhadap suatu urusan pemerintahan tertentu. Jabatan tersebut juga merupakan jabatan yang menjadi unsur pelaksana dalam otonomi daerah serta memiliki wewenang dan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas otonomi. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja

bisa diukur melalui pelaksanaan otonomi atau ketercapaian program/kegiatan yang telah direncanakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*). Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala *Likert*. Agar penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka diperlukan kesungguhan responden dalam menjawab setiap item pernyataan dari kuesioner. Oleh sebab itu, perlu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

Untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari tiga variabel penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan data ordinal sehingga dilakukan transformasi data menjadi data interval dengan menggunakan *Method of Succesive Intervals* (MSI) [12]. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan:

y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub>

X<sub>1</sub> = Implementasi *good governance*

X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ε = Error atau tingkat kesalahan

Pada pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan uji statistik T untuk analisis parsial dan uji statistik F untuk analisis simultan. Adapun analisis koefisien determinasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase (proporsi variasi) pengaruh variabel X (implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara simultan. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka nilai koefisien determinasi berarti semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [5].

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, implementasi *good governance* di Kabupaten Bandung Barat berada pada akumulasi skor 9.725 (Sangat Baik), sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada pada akumulasi skor 10.135 (Sangat Baik). Adapun

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada pada akumulasi skor 7.033 (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat sudah Baik meskipun terdapat beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dibahas pada pendahuluan, namun permasalahan tersebut tidak signifikan. Selain hal tersebut, dengan implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terus berkembang signifikan selaras dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji validitas pada penelitian ini menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga setiap item adalah valid. Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah 0,1757. Sedangkan uji reliabilitas menghasilkan nilai dari Cronbach's Alpha yaitu 0,818. Apabila nilai α lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan kuesioner yang digunakan dalam penelitian mempunyai konsistensi yang tinggi untuk mengambil data (Nunnaly 1967, dalam Ghozali, 2006:42). Dengan demikian, maka item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan bersifat *reliable* yang bermakna bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal dan konsisten.

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan uji normalitas, nilai dari signifikansi (2-tailed) yaitu sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05 maka penelitian ini memiliki nilai residual variabel yang terdistribusi dengan normal. Berdasarkan uji multikolonieritas, nilai *coefficient correlation* variabel sistem pengendalian intern pemerintah dengan variabel *good governance* adalah sebesar -0,485 atau 48,5%. Kemudian nilai dari *covariances* antara variabel independen tersebut adalah -0,001 atau 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari *coefficient correlation* dan *covariances* kurang dari 0,95 atau 95%, maka tidak terjadi multikolonieritas, maka model regresi pada penelitian ini sudah baik karena tidak terjadi korelasi yang serius di antara variabel independennya. Sedangkan berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik membentuk suatu pola yang tidak jelas dan titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka berdasarkan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang sama.

Tabel 1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan *Software SPSS*

Model	Unstandardized Coefficients	t	Collinearity Statistics
-------	-----------------------------	---	-------------------------

	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,542	4,187	2,995	
GG (X1)	,287	,048	5,931	,765
SPIP (X2)	,254	,048	5,268	,765

a. Dependent Variable: AKIP (Y)

Adapun hasil dari uji analisis regresi linear berganda menggunakan *Software SPSS Versi 23* didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

$$AKIP = 12,542 + 0,287*GG + 0,254*SPIP + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan atau model regresi linear berganda di atas maka nilai konstanta sebesar 12,542 bermakna bahwa apabila *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai nol (0), maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan bernilai sebesar 12,542.

Nilai koefisien regresi dari variabel *good governance* adalah sebesar 0,287. Hal menunjukkan bahwa apabila *good governance* naik sebesar satu unit, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,287 unit dengan anggapan variabel lainnya sebagai *ceteris paribus*. Semakin meningkat variabel *good governance* maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat pula. Demikian pula apabila variabel *good governance* semakin menurun, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun pula.

Nilai koefisien regresi dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebesar 0,254. Hal menunjukkan bahwa apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah naik sebesar satu unit, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,254 unit dengan anggapan variabel lainnya sebagai *ceteris paribus*. Semakin meningkat variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat pula. Demikian pula apabila variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin menurun, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin menurun pula.

Nilai  $\epsilon$  pada persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebesar nilai dari variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Variabel tersebut misalnya kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja (Wulandari, 2018)[20], penerapan anggaran berbasis kinerja (Nurrizcky, 2017)[12], Pengelolaan Keuangan Daerah (Yang dan Suartana, 2017)[19], dan gaya kepemimpinan (Perwirasari, 2016). [14]

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 0,5 atau 50%. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 0,500 atau 50% dan sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebesar 50% dari variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dijelaskan oleh variabel implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji statistik T, nilai dari  $t_{hitung}$  adalah 5,931 dan nilai dari  $t_{tabel}$  dengan  $df = 122$  dan signifikansi 5% adalah sebesar 1,9796. Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,931 > 1,9796$ ) maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima, artinya implementasi *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian untuk variabel  $X_2$ , nilai dari  $t_{hitung}$  adalah 5,268 dan nilai dari  $t_{tabel}$  dengan  $df = 122$  dan signifikansi 5% adalah sebesar 1,9796. Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,268 > 1,9796$ ) maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima, artinya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

Pada pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F, nilai dari  $F_{hitung}$  adalah sebesar 60,934 dan nilai dari  $F_{tabel}$  dengan  $df = 122$  dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 3,08. Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $60,934 > 3,08$ ) maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima, artinya implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, salah satu aspek yang cukup signifikan yaitu perbaikan dan peningkatan dalam penerapan *good governance* dan optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan peningkatan secara berjenjang dan berkesinambungan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Implementasi *good governance* di Kabupaten Bandung Barat pada penelitian ini yang terdiri dari prinsip *rule of law* (supermasi hukum), transparansi, efektivitas dan efisiensi,

akuntabilitas, dan *strategic vision* (visi strategis) telah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai prosentase dari jawaban-jawaban responden yang termasuk ke dalam kategori sangat baik;

- 2) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat pada penelitian ini yang terdiri dari indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern telah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai prosentase dari jawaban-jawaban responden yang termasuk ke dalam kategori sangat baik;
- 3) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat pada penelitian ini yang terdiri dari dimensi hukum dan kejujuran, dimensi proses, dimensi program, dan dimensi kebijakan telah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai prosentase dari jawaban-jawaban responden yang termasuk ke dalam kategori sangat baik;
- 4) Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji T, implementasi *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat;
- 5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji T;
- 6) Berdasarkan uji hipotesis dengan uji F, implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 50% sedangkan sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar dari model penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan menjadi suatu masukan yang dapat bermanfaat dan diterapkan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

- 1) Untuk Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Akuntansi Manajemen Pemerintahan secara umum.
- 2) Untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat didorong dengan adanya

kebijakan khusus mengenai pelaksanaan *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berjenjang dan berkelanjutan. Penerapan *good governance* didorong dengan adanya *blueprint* mengenai pelaksanaan *good governance*. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperkuat dengan landasan yuridis dan pengendalian secara terdesentralisasi dengan diberlakukannya *reward* dan *punishment* secara tegas.

- 3) Untuk Peneliti lainnya, penulis menyarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan pengembangan dalam penelitian lanjutan. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini ataupun pengembangan indikator dari indikator variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini serta bisa meningkatkan cakupan wilayah penelitian pada instansi yang berbeda.

Semoga dengan semakin banyaknya hasil penelitian dalam bidang pemerintahan dapat meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah di masa yang akan datang serta menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, W. *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang*. Politeknik Negeri Padang. 2015
- [2] Arif, B. Muchlis. dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- [3] Azlina, N. dan Amelia, I. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol 12 No 2. 2014
- [4] Bastian, Indra. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga
- [5] Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [6] Husodo, Hendro Susilo. 2017. *Predikat LAKIP dapat CC Bupati Abubakar tak kecewa*. <https://www.pikiran-rakyat.com>. Diupload pada 26 Januari 2017. Diakses pada 02 November 2018.
- [7] Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- [8] Junari, Tri. 2018. *Akuntabilitas pemerintah Bandung Barat raih predikat B*. <https://www.rmoljabar.com>. Diupload pada 31 Januari 2018. Diakses pada 02 November 2018.

- [9] Kisdiantoro. 2018. *KBB dapat nilai CC kinerja pemerintah dinilai mengecewakan.* <https://www.jabar.tribunnews.com>. Diupload pada 26 Januari 2017. Diakses pada 30 Oktober 2018
- [10] Mardismo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- [11] Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat
- [12] Nurizcky, Erni. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. Politeknik Negeri Bandung. 2017
- [13] Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [14] Perwirasari, Fajar. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Negeri Semarang.
- [15] Rondonuwu, A. Rompas, W. Pombengi, Jericho. 2010. *Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Universitas Negeri Manado.
- [16] Rusvalita, E. 2017. *Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dengan Implementasi Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Lampung.
- [17] Sutomonaio, Tarsisius. 2018. *Jawa Barat pertahankan nilai A untuk akuntabilitas kinerja.* <https://www.jabar.tribunnews.com>. Diupload pada 03 April 2018. Diakses pada 21 Oktober 2018.
- [18] Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah)
- [19] Yang dan Suartana, W. 2017. *Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah*. Universitas Udayana.
- [20] Wulandari, Ferida. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kab. Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.